

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ackerman, Susan. *Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media, 2009.
- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Agustine, Oli Viana. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Amiati Iskandar, Mia. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013.
- Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaakaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chaerudin,dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hadjon, Phillipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2025.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harun, M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Hermanus Horo, Herry. *Suap dan Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Ihsan, Bakir. *Pengertian Korupsi dan Prinsip – prinsip Antikorupsi*, Jakarta: Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, 2006.

Indroharto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Kristina, *Good Governance dalam Administrasi Publik*, Jakarta: Jurnal Universitas Terbuka, 2017.

M. Tuanakotta, Theodorus. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Penerbit Salembaempat, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2005.

Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik penyusunan dan Permasalahannya* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Mulyani, Lilis. *Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.

Nurdjana, IGM. *Sistem Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Rahman, Teuku. *Fungsi Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Penerbit KBM Indonesia, 2025.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suprayoga, Bima. *Pembuktian dan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025.
- Suriansumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, 2022.
- Ucok Suyono, Yoyok. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbit LaksBang Justitia, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widijowati, Dijan. *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.

B. Artikel Jurnal

- Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolaan dan Analisis Data Kualitatif, *Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (Desember 2021): 176.
- Faturachman, Renaldi. “Dimensi Moralitas Terhadap Hukum,” *IBLAM School of Law*, Vol.02. No.03 (2022). 1.
- Karunia, Kiki. “Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 23, No. 1 (April 2015): 57.
- Ura Weruin, Urbanus. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum” Jakarta: *Jurnal FH Universitas Tarumanagara Jakarta*, (2017). 1.
- Aniza Karunia, Ana. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Journal De Jure*, Vol. 10, No. 1, (2022): 124.

- Ariza, Dani “E – KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2024): 21.
- Barahama, Matrial, dkk., “Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Legislasi*, Vol. 5, No. 1, (April 2025): 57.
- Darmawan, Wahyu. “*Modus Operandi of Corruption in Government Procurement of Goods and Services and Its Countermeasures*,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol.13, No.1, (Maret 2025): 210.
- Firgita, Lia Trizza. “Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat.” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1. (Mei 2025): 12.
- Heru Romadhon, Ahmad dkk. “Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan.” *Journal De Jure*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2024): 9.
- Kedendi, Jon. “Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Tahun 2017.” *Jurnal Legislasi*, Vol. 9, No. 16, (Maret 2018): 6.
- Khalidawati S., Halimatus. “Korupsi di Sektor Kesehatan Indonesia: Studi Perbandingan dan Implikasi Hukum.” *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2. (Agustus 2025): 119.
- Listiari, Dyah dkk. “Membangun Generasi Sadar Hukum: Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 9, No. 1, (Oktober 2025): 15.
- Manan, Abdul. “Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003,” *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 2, (Maret 2003): 25.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Legislasi*, Vol. 5, No. 9, (Januari 2019): 4.
- Nur Mustaqim, Fariq. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Perspektif Teori Lawrence”. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2025): 154.
- Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal Pertahanan*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2015): 35.

Pradipta, Firwanda Sandi dan Widjajanti, Ermania. “Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025.” *Legalitas*, Vol. 4, No. 2, (Mei 2025): 10.

Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Lex Crimen*, Vol. 12, No.2, (Desember 2023): 11.

Rosisca, Napoleon. “Budaya Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, (Desember 2024): 7.

Said, Herlizon.” Peran Hukum dalam Mengatasi Korupsi di Sektor Kesehatan: Tinjauan Praktik dan Kebijakan.” *Journal De Jure*, Vol. 4, No. 9, (Februari 2025): 5.

Sekti P., Farida. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M Friedman.” *Legalitas*, Vol. 1, No. 1. (Juni 2022). 34.

Sepang, Ronny. “Aspek Hukum Dalam Kontrak Pengadaan Barang Milik Pemerintah.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Mei 2025): 9.

Sofya Arini, Ken dan Sofiani Danial, Putri. “Budaya Hukum Dalam Pinjaman Online: Menjamin Keseimbangan Antara Kepentingan Bisnis dan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Juni 2025): 27.

Sudirman Sesse, Muh. “Budaya Hukum dan Implikasi Terhadap Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Pertahanan*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2013): 172.

Waqiah, Sitti Qamariatul dan Arifin, Syamsul. “Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 8, No. 1, (April 2025): 7.

Wijanarko, Bobby. “Bid Rigging Sebagai Bentuk Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2005): 64.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Hanasti, Artono Hastodjaya., “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Pengadaan Alat Kesehatan.*” (Tesis Universitas Krisnadwipayana, 2025).

Harys, Oskandar. “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” Tesis Universitas Andalas, 2016.

Rachman, Retna K. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Persengkongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan.*” (Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022).

Rafly Nurfaizy, Muh. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara.*” Tesis Universitas Hasanuddin, 2022.

Sinaga, Everisco. “*Analisis Penyalahgunaan Kewenangan / Kekuasaan Pengguna Anggaran Dalam Proses Pengadaan Alat Kesehatan.*” (Skripsi Universitas Medan Area, 2017).

D. Internet

Budaya Hukum Dalam Pemberantasan Tindak,
<https://media.neliti.com/media/publications/73080-ID-budaya-hukum-dalam-pemberantasan-tindak.pdf> (diakses 17 Januari 2026).

Catatan Berita Kasus Mark Up Harga Genset RSUD Banten,
<https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Catatan-Berita-Kasus-Mark-Up-Harga-Genset-RSUD-Banten-Sigit-Wardojo-Loloskan-HPS.pdf> (diakses 11 Januari 2026).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jambi/kategori/korupsi-1.html>. Diakses 4 Februari 2026.

<https://www.antarafoto.com/id/view/633490/made-meregawa-di-periksa-kpk>
diakses 4 Februari 2026.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/18232501/pt-dki-perberat-hukuman-eks-pejabat-kemenkes-budi-sylvana-jadi-4-tahun>. Diakses 4 Februari 2026.

Jurnal Lex Crimen,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/6494/4/50977/164834> (diakses 11 Januari 2026).

Kesadaran Hukum Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia, https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8345_kesadaran-hukum-dalam-kehidupan-bernegara-di-indonesia (diakses 17 Januari 2026).

KPK Ungkap Mark up Pengadaan Barang, <https://asumsi.co/post/81533/kpk-ungkap-mark-up-pengadaan-barang-di-sektor-kesehatan-hingga-5-000-persen/> (diakses 11 Januari 2026).

Membongkar Modus Salah Bayar, <https://seknasfitra.org/membongkar-modus-salah-bayar-alat-kesehatan/> (diakses 17 Januari 2026).

Meningkat Negara Rugi Rp. 1 T, Diakses Melalui, <https://news.detik.com/berita/d3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>, (diakses 2 September 2025).

Sinergitas Kewenangan Lembaga, <file:///C:/Users/ASUS.LAPTOP-ASUSVIVO/Downloads/adminlexlibrum,+SINERGITAS+KEWENANGAN+LEMBAGA+PENEGAK.pdf> (diakses 17 Januari 2026).

Tinjauan Pustaka Logistik Alat – Alat Kesehatan <https://repository.akfarsurabaya.ac.id/id/eprint/698/5/BAB%20II%20-%20VI.pdf> (diakses 7 September 2025).

Tinjauan Pustaka Rumah Sakit, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old13/125845-S-5837-Analisis%20waktu-Literatur.pdf> (diakses 7 September 2025).

Tulisan Hukum Persekongkolan, <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Tulisan-Hukum-Persekongkolan-korbinbangkum.pdf> (diakses 11 Januari 2026).

Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi, <https://media.neliti.com/media/publications/43171-ID-tumpang-tindih-kewenangan-penyidikan-pada-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif.pdf> (diakses 17 Januari 2026).

E. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan (Jurisprudensi) No: 169 PK/Pid.Sus/2019

Putusan Pengadilan (Jurisprudensi) No: 19/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Putusan Pengadilan (Jurisprudensi) No: 40/PID.SUS-TPK/2025PT.DKI.